



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1993
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN
INDUSTRI PT. CIBINONG CENTER INDUSTRIAL ESTATE UNTUK
DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 ditetapkan bahwa suatu Kawasan Industri tertentu dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone);
 - b. bahwa sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT. Cibonong Center Industrial Estate, dipandang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat;
 - c. bahwa penunjukan dan penetapan wilayah usaha Kawasan Industri tersebut sebagai Kawasan Berikat perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);
 3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT. CIBINONG CENTER INDUSTRIAL ESTATE UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE).**

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT. Cibinong Center Industrial Estate seluas 24 hektar termasuk bangunan-bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Bantarjati, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, sebagai wilayah usaha Kawasan Industri yang diberi status Kawasan Berikat (Bonded Zone).

KEDUA : Batas-batas wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, adalah :

1. Batas sebelah Utara : Jalan Utama (Main Road)
2. Batas sebelah Barat : Saluran Irigasi;
3. Batas sebelah Selatan : Tanah kawasan PT. CCIE;
4. Batas sebelah Timur : Bukit/tanah kawasan PT.CCIE;

sesuai dengan gambar peta terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

KETIGA : Koordinat batas wilayah usaha tersebut dalam diktum **KEDUA** ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

KEEMPAT : Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dilakukan dengan Keputusan Presiden.

KELIMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO